

**Konsep *Nation-State* dalam Pemikiran Ideologi Politik Melayu
Islam pada Abad Ke-19 M
(Studi Pemikiran Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi (1787-1854))**

**Andi Chandra Jaya
FISIP UIN Raden Fatah Palembang
andicandrajaya_uin@radenfatah.ac.id**

Abstrac

The focus of this study is to answer the subject matter of how the concept of the nation-state according to Abdullah Munsyi in the constellation of Malay Islamic political ideology in the 19th century AD and how is the relevance of the concept of the current Indonesian nation state ? The study used the conscience morale theory of Ernest Renan and the social contract theory initiated by J. J. Roussae. This research is included in the library research category and uses historical approaches and political philosophy. The primary data in this study are Abdullah Musnyi's Hikayat Abdullah book published by Yayasan Karyawan, Kuala Lumpur, Malaysia in 2007 and secondary data, in the form of books, journal articles, papers, and others related to research problems. the findings of the research are: 1). In accordance with the theory of conscience morale Ernest Renan and the social contract theory initiated by J. J. Roussae, Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi was the originator of nationalism. Through his most important work, Hikayat Abdullah, he put forward the formulation of Malay identity in the formulation of the nation which was understood as a Malay tribe or race who had the right to be involved in determining the Malay political format not as a community under a political system that was authoritarian. 2). His closeness with the British colonial side, thus forming the liberal thinking he obtained from Raffles and his friends. He not only dismantled the manipulation of royal ideology, but at the same time put forward a new view of the existence of a humanist individual. 3). The understanding of nationality has egalitarian values that are very relevant to the current Indonesian context, especially the values of equality (egalitarianism) in the midst of the emergence of conflicts in various conflicts today. Likewise the concept of nation-state is closely related to nationalism and good governance where good governance is based on the absolute existence of transparency, open participation, and accountability in all state activities at every level of state management, so that a clean government is formed.

Keywords: *Abdullah Munsyi, Nation-State, and Malay Political Ideology*

1. Pendahuluan

Memasuki abad ke-19 M tradisi intelektual Islam di dunia Melayu mengalami penguatan pemikiran, terutama menyangkut orientasi ideologi politik.¹ Ketika itu setidaknya terdapat dua orientasi ideologi yang berkembang. *Pertama*, ideologi politik restorasi kerajaan yang menghendaki model kerajaan Melayu sebelumnya sebagai sistem sosial dan politik rakyat Melayu yang digagas oleh Raja Ali Haji.² *Kedua*, paham kebangsaan Melayu (*nation-state*) yang dimotori Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi melalui karyanya *Hikayat Abdullah*.³

Pemikiran Abdullah Munsyi tentang konsep kebangsaan Melayu (*nation-state*) bila dilihat dari pandangan ideologi politik dapat dimengerti sebagai negara yang penduduknya memandang diri mereka sebagai suatu bangsa. Ia merupakan entitas legal yang memiliki garis-garis batas geografis di bawah pemerintahan tunggal yang penduduk di dalamnya memandang diri mereka sebagai saling berkaitan satu sama lain.⁴ Negara bangsa adalah suatu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa atau untuk seluruh umat, berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu.⁵

Bila dikaji lebih mendalam konsep negara bangsa adalah konsep tentang negara modern yang terkait erat dengan paham kebangsaan (nasionalisme). Sebab suatu negara dikatakan telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara modern, setidaknya memenuhi syarat-syarat pokok selain faktor kewilayahan dan penduduk yang merupakan modal sebuah bangsa (*nation*) sebelum menjadi sebuah negara bangsa, maka syarat-syarat yang lain adalah adanya batas-batas teritorial wilayah, pemerintahan yang sah, dan adanya pengakuan dari negara lain.⁶

Konsepsi negara bangsa mutlak memerlukan *good governance*, pengelolaan yang baik, yang bertumpu kepada kemutlakan adanya transparansi, partisipasi terbuka, dan pertanggung jawaban di dalam semua kegiatan kenegaraan di setiap jenjang pengelolaan negara sehingga terbentuk pemerintahan yang bersih.⁷ *Good governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah,

¹Lihat Jajat Burhanuddin, "Tradisi Keilmuan dan Intelektual" dalam Taufik Abdullah (ed), *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam, Asia Tenggara* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 160.

²Lihat Jajat Burhanuddin, "Tradisi Keilmuan dan Intelektual", hlm. 161.

³Amin Sweeney, *Karya Lengkap Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi*, Jilid 1-3 (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Ecole francaise d'Extreme-Orient, 2005).

⁴Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations: Framework for Understanding* (London: Macmillan Publishing Company, 2nd edition, 1988), hlm. 19.

⁵Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 42.

⁶Dede Rosyada, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 32.

⁷Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, hlm. 75.

civil society, dan pihak swasta. *Good governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang-per-orang atau kelompok tertentu.⁸

Di sinilah, penelitian ini menjadi penting bila dikontekstualisasikan dengan kondisi politik di Indonesia. Saat ini bangsa Indonesia telah terjadi krisis identitas. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan "manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu *nation* (bangsa) dengan ciri-ciri khas, dan dengan cirikhas itu setiap bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam menata kehidupannya".⁹

Krisis identitas nasional dan keterpurukan bangsa Indonesia saat ini disinyalir karena sebagian besar penguasa dan politisi negeri ini berorientasi pada politik kekuasaan. Seperti diungkapkan Firmanzah bahwa dalam pragmatisme politik yang menjadi penting adalah kekuasaan. Sehingga partisipasi politik hanya menifestasi dari keinginan untuk berkuasa. Karena dorongan berkuasa begitu kuat, kekuasaan menjadi tujuan akhir dari berpolitik, sehingga mengabaikan kepentingan rakyat Indonesia¹⁰

Tentunya kondisi demikian tidak ingin terus menerus terjadi. Di sinilah kita perlu menggali kembali khasanah politik Islam Melayu abad ke-19 M, yakni konsep pemikiran *nation-state* Abdullah Munsyi (1787-1854). Sebab perjalanan bangsa Indonesia sejak beberapa abad yang lalu menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari kebudayaan Melayu. Salah satu sumbangan terbesar adalah turut mewujudkan dan membentuk jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Tak berlebihan apabila akhirnya kebudayaan Melayu disebut sebagai akar jati diri bangsa ini.

2. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini untuk menjawab pokok permasalahan bagaimana konsep *nation-state* menurut Abdullah Munsyi dalam konstelasi ideologi politik Melayu Islam di abad ke-19 M dan bagaimana relevansinya konsep negara bangsa Indonesia saat ini?.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang tak terpisahkan dengan pokok permasalahan di atas. Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan eksplanasi sejarah untuk mengungkapkan konsep *nation-state* menurut Abdullah Munsyi dalam konstelasi ideologi politik Melayu Islam di abad ke-19 M dan mendeskripsikan relevansinya konsep negara bangsa Indonesia saat ini.

⁸Lihat Lalolo Krina. *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Traansparansi dan Partisipasi*, (Jakarta: Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemrintahan yang Baik, BAPPENAS, 2003), hlm.6.

⁹"Krisis Identitas Bangsa", dalam <http://projectcitizenship.blogspot.co.id/2011/11/krisis-identitas-nasional.html>. Diakses 1 Agustus 2017, pukul. 10.00 WIB.

¹⁰Lihat Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018), hlm. 23.

Secara teoritis penelitian diharapkan memberikan kontribusi pemikiran, terutama bagi pelestarian tradisi keilmuan di dunia Melayu. Secara praktis penelitian ini berguna untuk para sejarawan dalam menulis ulang sejarah Melayu secara ilmiah dan objektif. Lebih, jauh, penelitian ini juga bermanfaat untuk memperkaya ide dan gagasan khazanah wawasan tentang kajian ilmu sejarah politik Islam, khususnya politik Islam Melayu serta diharapkan akan memberikan kontribusi berkaitan dengan upaya membangun *good governance* di Indonesia saat ini tengah carut marut.

D. Kerangka Teori

Penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan pemikiran ideologi politik, khususnya konsep negara bangsa (*nation-state*) dari intelektual Melayu Islam abad ke-19 M, Abdullah Munsyi. Untuk itu, digunakan *teori conscience morale* Ernest Renan. Menurut Ernest Renan, unsur yang pembentuk negara bangsa ialah: (1). Jiwa atau asas kerohanian yang sama, berupa pandangan hidup dan sistem nilai; (2). Memiliki solidaritas besar, misalnya disebabkan persamaan nasib dalam sejarah; dan (3). Munculnya suatu bangsa merupakan hasil dari sejarah. Di sini, menurut teori Ernest Renan, munculnya negara bangsa karena adanya pandangan hidup dan sistem nilai yang sama.¹¹

Untuk mengungkapkan kesepakatan bersama antar warga negara dan menjaga intergrasi dan identitas jati diri bangsa dalam *nation-state*, maka penelitian ini juga menggunakan teori kontrak sosial (*social contract*) yang digagas oleh J.J. Rousseau. Ia beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian dalam tradisi sosial masyarakat. Teori ini meletakkan negara untuk tidak berpotensi menjadi negara tirani, karena keberadaan suatu negara bersandar pada perjanjian warga negara untuk meningkatkan diri dengan suatu pemerintah yang dilakukan melalui organisasi politik. Yang berdaulat adalah rakyat, sedangkan pemerintah melaksanakan mandat bersama tersebut.¹² Dengan menggunakan teori Ernest Renan dan kontrak sosial (*social contract*) dari J. J. Rousseau akan dikaji konsep *nation state* Abdullah Munsyi, di mana ia menekankan pentingnya bangsa Melayu hidup bersama yang dibingkai oleh kesepakatan bersama dan menghasilkan hubungan kontraktual terbuka dalam memperjuangkan hak-haknya, baik sosial maupun politik dengan prinsip egaliter dan antiotokratik.

Selain kedua teori di atas, penelitian ini juga menggunakan teori hermeneutika,¹³ terutama hermeneutika yang pernah dikembangkan oleh Hans-

¹¹Lihat Syarif Firmansyah, "Tantangan Penguatan Komitmen Kebangsaan untuk membangun Karakter Warga negara Pada Masyarakat Perbatasan". *Laporan Penelitian*, (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013); lihat juga Adhyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 2; Abdul Choliq Murod, *Nasionalisme Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Sejarah CITRA LEKHA, Vol. XVI, No. 2 Agustus 2011, hlm. 47.

¹²Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 123-126.

¹³Lihat E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 23. Penjelasan lebih jauh tentang hermeneutik dapat dibaca karya Josef Bleicher, *Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika Sebagai Metode, Filsafat dan Kritik*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka

Georg Gadamer, maka untuk memahami *nation-state* Abdullah Munsyi dapat dilakukan dengan cara; *pertama*, membangun praanggapan (*prejudice*) adalah dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan *subject matter* penelitian ini. *Kedua*, interpretasi dapat terjadi apabila berlangsung *fusion of horizons*. Upaya untuk mencapai hal itu adalah dengan cara membandingkan pokok-pokok pemikiran *nation-state* menurut Abdullah Munsyi dengan referensi lain yang membahas pokok-pokok pemikiran sejenis. Melalui cara dapat dirumuskan relevansi kandungan *nation-state* yang digagas Abdullah Munsyi dengan sistem politik Islam saat ini.

4. Metodologi

Sumber data dalam penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui studi pustaka, baik yang berkaitan dengan biografi dan karya tulis Abdullah Munsyi, khususnya kitab *Hikayat Abdullah*. Namun karena karya asli yang ditulis tangan oleh Abdullah Munsyi sampai penelitian ini dilaksanakan tidak ditemukan, maka yang dijadikan sumber primer adalah buku *Hikayat Abdullah* karya Abdullah Munsyi terbitan Yayasan Karyawan, Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2007. Untuk melengkapi data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yakni karya Amin Sweeney berjudul *Karya Lengkap Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi*, Jilid 1-3 yang diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Ecole française d'Extreme-Orient, Jakarta tahun 2005 dan 2008. Selain itu, penulis juga menggunakan data sekunder lainnya, baik berupa buku, artikel jurnal, makalah, dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan filsafat politik. Pendekatan historis digunakan untuk mengungkapkan biografi, setting sosio kulutral dan politik di masa Abdullah Munsyi. Sedangkan pendekatan filsafat politik digunakan untuk mengkaji pemikiran *nation-state* Abdullah Munsyi dan kontekstualisasinya di Indonesia saat ini.

Penelitian sejarah yang pada dasarnya adalah penelitian terhadap sumber-sumber sejarah sebagai implementasi dari tahapan kegiatan yang tercakup dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

5. Pemikiran Abdullah Munsyi Tentang Politik

Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi adalah seorang keturunan Arab dan Keling. Ayahnya, Syeikh Abdul Kadir, berkebangsaan Arab dan ibunya, Salmah, orang Keling (India). Pada umumnya orang mencatat tahun kelahiran Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi pada tahun 1796 dan meninggal pada tahun 1854.¹⁴ Tetapi menurut I.R. Poedjawijatna, ia dilahirkan pada tahun 1774.¹⁵ Tempat

Baru, 2003), hlm. 5-29 dan Richard E. Palmer, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 3-13.

¹⁴U.U. Hamidy Raja Hamzah Yunus Tengku Bun Abubakar, *Pengarang Melayu Dalam Kerajaan Riau dan Abdullah bin Abdul Munsyi Dalam Sastra Melayu*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981), hlm. 36.

¹⁵I.R. Poedjawijatna, *Iktisar Kesusastraan Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia , 1959), hlm. 34.

meninggalnya menurut Datoek Besar dan R. Roolvink¹⁶ adalah di Makkah, tetapi penulis-penulis yang lain mengatakan di Jedah.¹⁷

Masa kanak-kanak, Abdullah bin Abdul Kadir Munsyidihabiskan di Malaka. Ia mulai belajar menulis di usia empat tahun dengan “tulisan cakar ayam” di papan tulis. Di usia enam tahun, Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi pernah terserang penyakit disentri dan di usia tujuh tahun tak kala teman-teman sebayanya sudah bisa melagukan ayat-ayat al-Quran, namun ia masih belum bisa membaca al-Quran. Justru ia belajar meniru tulisan-tulisan berbahasa Arab dengan penanya. Akibatnya, ayahnya, Abdul Kadir, yang geram melihat keterbelakangan anaknya, sehingga mengirim Abdullah ke Sekolah Qur’an Kampung Pali (Kampung Pali Koran School).

Di masa Sekolah Qur’an Kampung Pali, Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi harus belajar dengan keras di bawah bimbingan dan pengawasan ayahnya langsung. Abdul Kadir sendiri memang seorang yang berwatak keras. Di usianya yang kesebelas tahun, Abdullah memperoleh uang sebagai upah pekerjaannya menyalin teks al-Quran dan merupakan pekerjaan yang pertama kali ia lakukan. Dari sinilah dapat dikatakan sebagai titik awal bagi karirnya. Tiga tahun kemudian ia mengajar agama bagi sebagian besar tentara muslim yang ditempatkan di Benteng Malaka. Tentara menyebutnya “munsyi”, istilah Melayu untuk guru bahasa, gelar yang kemudian tersemat kepadanya hingga akhir hidupnya. Didikan ayahnya yang keras dalam bidang agama dan pengetahuan umum mengantarkannya menjadi seorang guru bahasa dan mampu menguasai berbagai bahasa, di antaranya bahasa Arab, Tamil, India, Inggris, dan Melayu.

Meskipun Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi merupakan peranakan Arab dan Tamil, namun dibesarkan di tengah budaya Melayu di Melaka, yang pada saat itu baru saja dijajah Britania (Inggris). Pada awalnya Abdullah mengajarkan bahasa Melayu kepada tentara keturunan India di garnisun Malaka, dan kepada para misionaris, pegawai dan pebisnis Britania dan Amerika Serikat. Ia juga pernah bekerja untuk Thomas Stamford Raffles sebagai juru tulis, menerjemahkan Injil serta teks agama Kristen lainnya untuk *London Missionary Society* di Malaka, dan menjadi pencetak untuk *American Board of Missions* di Singapura.

Dalam perjalanannya hidupnya, Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi pada awalnya tinggal di Malaka, selanjutnya setelah berdiri Singapura, ia pindah ke sana. Sungguhpun alasan pertama mengenai kepindahan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi ke Singapura untuk menghilangkan kesedihannya karena istrinya baru saja meninggal di Malaka. Namun, ditinjau dari jalan hidupnya sebenarnya karena Inggris telah menyerahkan Malaka kepada Belanda dan kemudian Raffles membuka kota Singapura. Kedatangan Belanda ke Malaka menggantikan Inggris tidak memberikan iklim yang baik bagi Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi--demikian juga terhadap sebagian besar penduduk Malaka yang lain--karena Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi tidak menguasai bahasa Belanda. Tampaknya

¹⁶Datoek Besar dan R. Roolvink, *Hikayat Abdullah*. (Jakarta: Jambatan, 1953).

¹⁷Ajib Rosidi, *Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia*, (Bandung: Binacipta 1969), hlm. 5; Nursinah Supardo, *Kesusastraan Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Fasco 1956), hlm. 43; Zuber Usman, *Kesusastraan Lama Indonesia*. (Jakarta: Gunung Agung.1963), hlm. 10.

Belanda tidak memerlukan orang-orang yang ahli dalam bidang bahasa, seperti Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi.¹⁸

Dalam hubungan saling mengisi itulah Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi memperoleh nafkah untuk memenuhi kehidupannya, yakni sebagai guru bahasa, penerjemah, dan informan bagi orang Inggris. Raffles dan kawan-kawannya dapat mengetahui masyarakat Melayu dan dunianya. Mereka bukan hanya memerlukan ilmu pengetahuan, melainkan terlebih-lebih untuk kepentingan kekuasaan Inggris. Karena eratnya hubungan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dengan pihak Inggris, terutama Raffles, sehingga Datoek Besar dan R. Roolvink sampai mengatakan bahwa Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi seolah-olah “boneka” Inggris. Rasanya dapat pula dikatakan, jika tidak ada Inggris tidak ada Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi.¹⁹

Pekerjaannya sebagai guru bahasa bagi orang-orang Inggris, Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi mendapat kesempatan belajar bahasa Inggris dari orang-orang Inggris. Ia belajar bahasa Inggris terutama kepada Tuan Milne, salah seorang guru Anglo College di Singapura. Kemampuan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dalam bahasa Inggris semakin memperluas kegiatannya dalam bidang bahasa dan sastra. Bersama Tuan Thomsen, mereka menerjemahkan kitab Injil Matius dan Kisah Segala Rasul-rasul. Bersama dengan Paderi Keasberry diterjemahkan kitab Henry dengan pengasuhnya ke dalam bahasa Melayu. Dalam usaha menerjemahkan kitab Injil itu, Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi mengkritik bahasa Melayu yang dipakai oleh penerjemah Injil yang terdahulu. Kata-kata, seperti berkesemauan, berkejabatan, menurut Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi terlalu janggal atau canggung dalam bahasa Melayu, sehingga seperti antan dicongkikan duri. Ungkapan anak Allah, kerajaan surga, mulut Allah, dan bapamu yang ada di surga, menurut Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi adalah bentuk-bentuk yang canggung di telinga orang Melayu.²⁰

Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi memandang bahasa sebagai suatu ilmu yang amat penting. Bahasa baginya merupakan titik api kegiatan hidup manusia karena sesungguhnya, menurut Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi, bahasa itu membuat manusia berakal dan memperkaya khazanah keilmuan.²¹ Di sisi pandangan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi yang seperti itu, ia berulang-ulang mengkritik dan mengecam orang-orang Melayu yang tidak mau memperhatikan dan mempelajari bahasa dan kebudayaannya.

Kegiatan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dalam bidang kesusastraan tentu berpangkal dan sangat banyak ditentukan oleh kegiatannya dalam bidang bahasa. Dalam bidang kesusastraan inilah tampaknya Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi jauh lebih menonjol. Karena itu, tak mengherankan jika disebut bidang

¹⁸Lihat Rina Rehayati dan Irzum Farihani, “Transmisi Islam Moderat Oleh Raja Ali Haji di Kesultanan Riau-Lingga pada Abad Ke-19”. Dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 25 No.2, Juli-Desember, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm.181.

¹⁹Datoek Besar dan R. Roolvink, *Hikayat Abdullah*, hlm. xii.

²⁰*Ibid.*, hlm. 38.

²¹Datoek Besar dan R. Roolvink, *Hikayat Abdullah*, hlm. 321.

kesusastraan ini, menempatkan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi sebagai tokoh pembaru yang amat penting dalam abad ke-19 M.

Melalui karya-karyanya yang dipandang memakai bahasa sehari-hari, atau mendekati bahasa Indonesia sekarang, berkisar dari fantasi tentang raja-raja dengan putri-putri yang cantik kepada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, para penulis buku kesusastraan (Indonesia), Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dipandang telah mengubah kesusastraan kuno menjadi kesusastraan baru. Sebagai akibat penilaian yang demikian, Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi menjadi semacam garis pemisah antara kesusastraan kuno dan kesusastraan baru. Ia adalah fajar zaman baru, demikian ungkap Zuber Usman. Karena Abdullah meninggalkan yang bercorak tradisional dan bergerak ke arah yang rasional, sehingga bagi Burton Raffel,²² Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dipandang sebagai Bapak Sastra Melayu Modern.²³

Setidaknya terdapat empat (4) aspek penting yang terangkum pada pemikiran Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dalam karyanya berjudul *Hikayat Abdullah* ini, yakni bidang ekonomi, sosial, politik dan agama yang terkandung di dalam setiap bab di dalam hikayat ini. Dalam hal politik, khususnya sistem pemertintahan, Abdullah mengulas dan mengkritik sistem pemerintahan monarki. Masyarakat Melayu menganut sistem pemerintahan monarki absolut di mana kekuasaan berada di tangan raja, tanpa batas. Dalam sistem pemerintahan monarki absolut berprinsip seorang [raja](#) mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya dan rakyat harus mentaati perintah raja sepenuh hati. Artinya, sistem pemerintahan monarki absolut adalah kekuasaan politik dan hukum berada di tangan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Banyak kisah-kisah yang menceritakan hukuman para raja yang tidak adil atau tidak masuk akal. Di antaranya seperti di bawah ini;

“Maka setelah sudah berkampung, maka Tuan Raffles pun duduklah dia atas tempat bicara itu, katanya, “Tuan Sultan dan Temenggung, bagaimanakah adat dalam undang-undang orang Melayu, jikalau seorang rakyat menderhaka kepada rajanya demikian ini?” Maka jawab Sultan, “Tuan kalau adat Melayu, orang itu dibunuh habis-habis dengan anak bininya dan kaum keluarganya. Maka tiang rumahnya dibalikkan dan ke atas dan bumbung rumahnya ke bawah dan tanah bekas rumahnya itu pun dibuangkan ke laut, adanya”.²⁴

Abdulah bin Abdul Kadir Munsyi memaparkan pemikiran terhadap golongan feodal, bangsawan dan raja yang zalim. Abdullah Munsyi menunjukkan sikap benci dan menganggap budaya raja-raja Melayu sebagai kolot dan tidak adil. Ia menganggap raja-raja Melayu sangat zalim karena kehendak mereka tidak boleh dihalangi atau dilarang. Sebab jika dilarang berdampak buruk pada dirinya sendiri. Sikap dan pemikirannya yang tidak senang pada kehidupan feodalistik

²²U.U. Hamidy Raja Hamzah Yunus Tengku Bun Abubakar, *Pengarang Melayu dalam Kerajaan Riau dan Abdullah Bin Abdul Kildir Munsyi dalam Sastra Melayu*, hlm. 38.

²³Lihat artikel Jan van der Putten, “Abdullah Munsyi dan Misionaris”. Dalam *Jurnal Bijdragen tot de Taal*, Vol. 162, No. 4, (Koninklijk Instituut voor taal-, Land- en Volkenkunde, (BKI) 162-4 2006), hlm. 407-440.

²⁴*Ibid.*, hlm. 180.

raja-raja Melayu, seperti gambaran tentang Sultan Hussin yang dikatakan gemuk dan kuat makan.

Di samping itu, Abdullah juga sangat menentang perilaku elit kerajaan yang sangat sewenang-wenang dengan rakyatnya. Sebagai contoh bila seorang raja ingin mempersunting seorang gadis, maka ia akan memaksa gadis tersebut menjadi gundik mereka. Bahkan, terdapat juga gadis-gadis yang dinikahi dengan paksa. Adat atau undang-undang yang mengatakan tidak boleh mendurhakai raja menyebabkan khatib terpaksa menikahkan juga gadis dengan raja mereka.

Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi termasuk salah seorang sastrawan Melayu yang cukup produktif menulis. U.U. Hamidy, Raja Hamzah Yunus, dan Tengku Bun Abubakar mencatat di antara karya-karya Abdullah Munsyi, di antaranya; 1).Hikayat Abdullah; 2).Sejarah Melayu, 3).Hikayat Panja Tanderan, 4).Syair Singapura Dimakan Api, 5).Kisah Pelayaran Abdullah dari Singapura ke Kelantan, 6).Kisah Pelayaran Abdullah ke Negeri Jeddah.²⁵

6. Temuan dan Pembahasan Hasil Penelitian

Paham teokrasi-monarkibangsa Melayu membuat Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi “gerah”, sehingga memunculkan perlawanan melalui karya-karya sastranya yang mengkritik perilaku para raja Islam Melayu yang dalam terminologi politik modern disebut *monarchomach* atau penentang raja/anti kerajaan. Banyak kisah yang diceritakan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi mengenai raja yang tidak adil atau tidak masuk akal. Di antaranya seperti di bawah ini;

“Maka setelah sudah berkampung, maka Tuan Raffles pun duduklah dia atas tempat bicara itu, katanya, “Tuan Sultan dan Temenggung, bagaimanakah adat dalam undang-undang orang Melayu, jikalau seorang rakyat menderhaka kepada rajanya demikian ini?” Maka jawab Sultan, “Tuan kalau adat Melayu, orang itu dibunuh habis-habis dengan anak bininya dan kaum keluarganya. Maka tiang rumahnya dibalikkan dan ke atas dan bumbung rumahnya ke bawah dan tanah bekas rumahnya itu pun dibuangkan ke laut, adanya”.²⁶

Abdullah Munsyi menunjukkan sikap benci dan menganggap budaya raja-raja Melayu sebagai kolot dan tidak adil. Ia menganggap raja-raja Melayu sangat zalim karena kehendak mereka tidak boleh dihalangi atau dilarang. Sebab jika dilarang berdampak buruk pada dirinya sendiri. Sikap dan pemikirannya yang tidak senang pada kehidupan feodalistik raja-raja Melayu, seperti gambaran tentang Sultan Hussin yang dikatakan gemuk dan kuat makan. Selain itu, Abdullah juga turut mengatakan Sultan Hussin bodoh karena menolak tawaran Tuan Raffles yang menginginkan anak Sultan belajar ke Benggala supaya belajar pelbagai jenis ilmu pengetahuan. Kritikan ini dapat dilihat berdasarkan petikan;

²⁵U.U. Hamidy, Raja Hamzah Yunus, dan Tengku Bun Abubakar, *Pengarang Melayu Dalam Kerajaan Riau dan Abdullah bin Abdul Munsyi Dalam Sastra Melayu*, hlm.39-43.

²⁶Abdullah Abdul Kadir Munsyi, *Hikayat Abdullah*, (Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan, 2007), hlm. 180.

“Bahawa sesungguhnya adalah pada fikiranku maka nyatalah kebodohan dan kekurangan fikiran Sultan itu, maka alangkah baik dan besar tolongan Tuan Raffles itu hendak mengajarkan anak-anak mereka itu supaya kemudian kelak ia boleh mengerti dan mendapat kepandaian dan hikmah akan menambahkan akal dan pengetahuan.”²⁷

Di samping itu, Abdullah juga sangat menentang perilaku elit kerajaan yang sangat sewenang-wenang dengan rakyatnya. Sebagai contoh bila seorang raja ingin mempersunting seorang gadis, maka ia akan memaksa gadis tersebut menjadi gundik mereka. Bahkan, terdapat juga gadis-gadis yang dinikahi dengan paksa. Adat atau undang-undang yang mengatakan tidak boleh mendurhakai raja menyebabkan khatib terpaksa menikahkan juga gadis dengan raja mereka.

“Syahadan lagi, hendaklah tuan-tuan mendengar ada lagi suatu ajaib yang kudengar, kecualinya ada raja-raja Melayu yang membuat sesuatu adat, iaitu bukannya adat orang Islam dan bukannya adat bangsa-bangsa lain pun yang ada di dunia, melainkan adat iblis atau adat hawa nafsu yang jahat, iaitu kalau raja-raja mengambil anak-anak perempuan orang kebanyakan hendak dibuat gundik itu dengan kerasnya, semata-mata tiada dengan redha perempuan itu, istimewa ibu bapanya maka digagahinya disuruhnya bawa perempuan itu ke rumahnya, maka dipanggilnya khatib atau lebai-lebai yang bebal yang tiada mengetahui hukum agama Islam dan yang tamak akan upah”.²⁸

Selanjutnya, fakta bahwa Inggris telah mendarat di Singapura mereka telah memberlakukan hukum di Singapura. Undang-undang ini diberlakukan untuk menjamin keamanan negara Singapura dari luar. Ada kutipan yang menceritakan tentang penyusunan negara Singapura dalam *Hikayat Abdullah* ini;

“Syahadan, setelah ramailah sudah negeri Singapura, maka oleh Tuan Raffles dikarangkannyalah undang-undang, iaitu menyatakan adat-adat dan hukum-hukum yang patut dipakai dalam negeri Singapura supaya terpelihara segala isi negeri daripada segala bahaya dan kejahatan, adanya.”²⁹

Cuplikan bait-bait sastra yang ditulis Abdullah Munshi dalam *Hakayat Abdullah* di atas dapat dikatakan sebagai “pergolakan batin” Abdullah bin Abdul Kadir Munshi melihat kondisi masyarakat Melayu yang diperintah oleh para raja tiran dan tidak adil yang dinilainya bertanggung jawab atas keterbelakangan masyarakat Melayu. Para raja telah merampas hak-hak rakyat dan berbuat segala sesuatu yang penting bagi kehidupan mereka.

Melihat kondisi masyarakat demikian Abdullah bin Abdul Kadir Munshi menggagas faham kebangsaan (*nation-state*) Melayu. Melalui karya terpentingnya, *Hakayat Abdullah*, ia mengedepankan rumusan identitas masyarakat Melayu dalam rumusan bangsa, yang dipahami sebagai suku atau ras Melayu sebagai sebuah komunitas yang sepenuhnya berada di bawah sistem kekuasaan politik

²⁷*Ibid.*, hlm. 187.

²⁸*Ibid.*, hlm. 301.

²⁹*Ibid.*, hlm. 198.

yang berbasis pada ideologi kerajaan. Melainkan sebagai sebuah ras atau bangsa yang memiliki hak untuk terlibat menentukan format politik Melayu.³⁰

Bangsa dalam terminologi Abdullah Munsyi mengacu kepada rakyat (*common people*). Artinya, konsep bangsa dalam pemahaman Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi memiliki nilai egalitarian. Hal ini sangat kontras dengan bangsa yang dipahami dari ideologi kerajaan (monarki) yang sangat elitis dan aristokratis. Sebab doktrin kesetaraan (egalitarianisme) merupakan hal yang menjadi barang berharga bagi kehidupan Indonesia saat ini. Munculnya konflik tuntutan kesetaraan gender, konflik jihad dengan kekerasan, konflik pertikaian antar ras dan agama, dan konflik lainnya, merupakan imbas dari sikap manusia yang dijiwai oleh prasangka kebenaran tunggal.

Dalam rangka menghindari berbagai konflik dan menumbuhkan sikap egalitarianisme dalam masyarakat Indonesia gagasan *nation-state* yang digagas Abdullah Munsyi pada abad ke-19 M lalu, masih tetap aktual dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini. Meskipun pemikiran politik Abdullah Munsyi cenderung liberal. Namun setidaknya banyak menekankan pentingnya bangsa Melayu memperjuangkan hak-haknya baik sosial maupun politik mereka. Ia banyak mengkritik ideologi politik kerajaan yang telah membuat kekacauan karena raja-raja telah berbuat tiran dan tidak adil.³¹ Menurut pemikirannya konsep kebangsaan adalah komunitas bangsa Melayu yang merupakan bangunan sosial bagi masyarakat di mana prinsip yang dianut bersifat egaliter dan antiotokratik.³²

Dalam perspektif ilmu ketatanegaraan, konsep negara bangsa (*nation-state*) yang digagas Abdullah Munsyi merupakan konsep tentang negara modern yang terkait erat dengan paham kebangsaan atau nasionalisme. Nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Dengan demikian, nasionalisme sangat penting sekali bagi bangsa Indonesia untuk bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang aman dan damai, adil dan sejahtera.

7. Simpulan

Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi atau yang lebih dikenal dengan Abdullah Munsyi adalah penggagas paham kebangsaan. Melalui karya terpentingnya, *Hikayat Abdullah*, ia mengedepankan rumusan identitas Melayu dalam rumusan bangsa yang dipahami sebagai suku atau ras Melayu. Ia menekankan bahwa bangsa Melayu sebagai sebuah komunitas yang memiliki hak untuk terlibat menentukan format politik Melayu bukan sebagai komunitas yang

³⁰Jajat Burhanuddin, "Tradisi Keilmuan dan Intelektual", dalam Taufik Abdullah (ed, et al), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 162.

³¹Daniel Arif Budiman, "Ideologi Politik Melayu Abad ke-19 (Studi Komparasi Pemikiran Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dan Raja Ali Haji)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), hlm.3.

³²Lihat Jajat Burhanuddin, "Tradisi Keilmuan dan Intelektual", hlm. 161-162-164.

berada di bawah sistem politik yang berbasis pada ideologi kerajaan yang cenderung otoriter.

Sesuai dengan *teori conscience morale* Ernest Renan dan teori kontrak sosial (*social contract*) yang digagas oleh J. J. Rousseau, Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi penggagas paham kebangsaan. Melalui karya terpentingnya, *Hikayat Abdullah*, ia mengedepankan rumusan identitas Melayu dalam rumusan bangsa yang dipahami sebagai suku atau ras Melayu yang memiliki hak untuk terlibat menentukan format politik Melayu bukan sebagai komunitas yang berada di bawah sistem politik yang berbasis pada ideologi kerajaan yang cenderung otoriter.

Kedekatannya dengan pihak kolonial Inggris, sehingga membentuk pemikiran liberal yang diperolehnya dari Raffles dan kawan-kawannya. Ia tidak hanya membongkar manipulasi ideologi kerajaan, tetapi sekaligus mengedepankan pandangan baru tentang eksistensi individu yang humanis. Paham kebangsaannya memiliki nilai egalitarian yang sangat relevan dengan konteks Indonesia saat ini, khususnya nilai-nilai kesetaraan (*egalitarianisme*) di tengah munculnya konflik berbagai konflik saat ini. Demikian juga konsep *nation-state* terkait erat dengan nasionalisme dan *good governance* di mana pengelolaan pemerintahan yang baik, yang bertumpu kepada kemutlakan adanya transparansi, partisipasi terbuka, dan pertanggung jawaban di dalam semua kegiatan kenegaraan di setiap jenjang pengelolaan negara, sehingga terbentuk pemerintahan yang bersih..

Daftar Pustaka

- Abdul Choliq Murod, *Nasionalisme Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Sejarah CITRA LEKHA, Vol. XVI, No. 2 Agustus 2011
- Abdullah Abdul Kadir Munsyi, *Hikayat Abdullah*, (Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan, 2007)
- Adhyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005)
- Ajib Rosidi, *Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia*, (Bandung: Binacipta 1969)
- Amin Sweeney, (ed), *Karya Lengkap Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi Jilid 3 Hikayat Abdullah*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009)
- Amin Sweeney, *Karya Lengkap Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi*, Jilid 1-3 (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Ecole francais d'Extreme-Orient, 2005).
- Daniel Arif Budiman, "Ideologi Politik Melayu Abad ke-19 (Studi Komparasi Pemikiran Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dan Raja Ali Haji), *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010)
- Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations: Framework for Understanding* (London: Macmillan Publishing Company, 2nd edition, 1988)

- Datoek Besar dan R. Roolvink, *Hikayat Abdullah*. (Jakarta: Jambatan, 1953).
- Dede Rosyada, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana, 2005)
- E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999)
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018)
- I.R. Poedjawijatna, *Ikhtisar Kesusastraan Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1959)
- Jajat Burhanuddin, "Tradisi Keilmuan dan Intelektual" dalam Taufik Abdullah (ed), *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam, Asia Tenggara*" (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002)
- Jan van der Putten, "Abdullah Munsyi dan Misionaris". Dalam *Jurnal Bijdragen tot de Taal*, Vol. 162, No. 4, (Koninklijk Instituut voor taal-, Land- en Volkenkunde, (BKI) 162-4 2006)
- Josef Bleicher, *Hermeutika Kontemporer: Hermeneutika Sebagai Metode, Filsafat dan Kritik*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003)
- Lalolo Krina. *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Traansparansi dan Partisipasi*, (Jakarta: Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, BAPPENAS, 2003)
- Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*,(Jakarta: Paramadina, 2004)
- Nursinah Supardo, *Kesusastraan Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Fasco 1956), hlm. 43; Zuber Usman, *Kesusastraan Lama Indonesia*. (Jakarta: Gunung Agung.1963)
- Richard E. Palmer, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Rina Rehayati dan Irzum Farihahi, "Transmisi Islam Moderat Oleh Raja Ali Haji di Kesultanan Riau-Lingga pada Abad Ke-19". Dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 25 No.2, Juli-Desember, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).
- Syarif Firmansyah, "Tantangan Penguatan Komitmen Kebangsaan untuk membangun Karakter Warga negara Pada Masyarakat Perbatasan". *Laporan Penelitian*, (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013)
- U. U. Hamidy Raja Hamzah Yunus Tengku Bun Abubakar, *Pengarang Melayu Dalam Kerajaan Riau dan Abdullah bin Abdul Munsyi Dalam Sastra Melayu*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981)
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education)*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Identitas Bangsa", dalam <http://projectcitizenship.blogspot.co.id/2011/11/krisis-identitas-nasional.html>. Diakses 1 Agustus 2017, pukul. 10.00 WIB.